

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era digital ini, teknologi telah menjadi aspek terpenting dalam peradaban umat manusia yang kian hari terus mengalami perubahan. Perkembangan teknologi yang pesat, menjadikan pertukaran informasi dan interaksi global jadi lebih cepat, sebab tidak terbatas pada batas-batas konvensional bangsa dan negara. Mobilitas tinggi dengan penyebaran informasi yang tidak terbendung dalam interaksi global telah mengubah dunia seolah-olah transparan seakan batas wilayah tidak lagi jadi penghalang. Peristiwa tersebut menimbulkan sebuah fenomena yang sekarang kita kenal dengan sebutan globalisasi.

Pada hakikatnya globalisasi telah mempengaruhi semua bidang kehidupan seperti ideologi, politik, hukum, ekonomi, dan pendidikan. Perubahan ini menunjukkan bahwa tidak ada lagi batasan yang mengikat secara nyata pada pergaulan global. Hal ini berdampak pada proses pergeseran tatanan kehidupan masyarakat, sehingga masuknya pengaruh globalisasi melahirkan sebuah kenyataan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) telah menjadikan perubahan yang sangat signifikan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

Fenomena ini menimbulkan berbagai dampak pada seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Seperti halnya dua sisi pada mata uang, yakni dampak dari sisi positif dan juga dampak dari sisi negatif. Positifnya yaitu dengan adanya kemajuan teknologi dapat mempermudah segala kebutuhan umat manusia. Kondisi ini membuat perkembangan teknologi di era digital menjadi instrumen paling berpengaruh dalam perubahan pola kehidupan pada saat ini. Yang mengakibatkan terjadinya perubahan besar pada kehidupan sosial ekonomi kearah lebih produktif, efektif dan efisien. Sehingga banyak negara berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam menghadapi kompetensi di era global ini.

Namun jika tidak diwaspadai, fenomena globalisasi ini dapat memberikan dampak negatif terhadap kehidupan berbangsa. Paling fundamental adalah pergeseran nilai-nilai adiluhung yang menjadi dasar pandangan hidup telah bergeser pada seperangkat nilai-nilai universal, di mana keseragaman merupakan ciri utamanya. Hal ini, menghadirkan tantangan tersendiri bagi negara-negara yang memiliki nilai-nilai sendiri dengan digali dari akar sejarahnya masing-masing yang tentunya memiliki perbedaan satu sama lainnya. Kondisi ini secara tidak langsung mempengaruhi pola pikir, pola sikap dan perilaku masyarakat di berbagai belahan dunia, tidak terkecuali negara yang memiliki sifat heterogen seperti negara Indonesia.

Secara sosiologi-antropologi bangsa Indonesia merupakan bentuk dari bangsa majemuk yang masyarakatnya terdiri dari berbagai perbedaan-perbedaan suku, ras, adat istiadat, bahasa, budaya, agama dan kepercayaan. Dengan tingkat diferensiasi yang tinggi serta adanya pranata yang bersifat saling mengisi dan saling ketergantungan satu sama lain menjadikan kemajemukan masyarakat bersifat multidimensional. Pierre L. Van Den Berghe (dalam Nasikun, 2012, hlm. 40) menyebutkan ada beberapa karakteristik sifat-sifat dasar dari suatu masyarakat majemuk, yaitu: Terjadinya segmentasi ke dalam bentuk kelompok-kelompok yang sering kali memiliki subkebudayaan yang berbeda satu sama lain, Secara relatif sering kali mengalami konflik-konflik di antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, Secara relatif integrasi sosial tumbuh di atas paksaan dan saling ketergantungan di dalam bidang ekonomi.

Kondisi struktur masyarakat Indonesia secara garis besar ditandai dengan dua ciri khasnya yang bersifat unik. Secara, horizontal, ditandai oleh bukti adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, perbedaan-perbedaan agama, adat serta perbedaan-perbedaan yang bersifat kedaerahan. Secara vertikal, kemajemukan masyarakat Indonesia melahirkan stratifikasi sosial yang ditandai adanya pembedaan masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat antara lapisan atas dan lapisan bawah yang muncul disebabkan adanya pengaruh kemajuan teknologi dan ekonomi.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan kemajemukan masyarakat Indonesia yang demikian terjadi. Nasikun (2012, hlm. 43) membagi beberapa situasi yang melahirkan Indonesia sebagai negara yang majemuk yakni: Keadaan/geografis yang membagi wilayah Indonesia atas kurang lebih 3.000 pulau yang terserak di suatu daerah ekuator sepanjang kurang lebih 3.000 mil dari timur ke barat dan lebih dari 1.000 mil dari utara ke selatan, merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap terciptanya keberagaman suku bangsa di Indonesia. Masuknya emigran dari Tiongkok pada 2.000 tahun sebelum Masehi yang menetap di daerah yang terpisah-pisah karena keadaan geografis mempengaruhi keberagaman suku bangsa.

Kenyataan bahwa Indonesia terletak di antara Samudera Indonesia dan Samudera Pasifik, sangat mempengaruhi keberagaman agama dan kebudayaan di dalam masyarakat Indonesia. Karena letaknya yang berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan laut melalui kedua samudera tersebut, maka masyarakat Indonesia telah sejak lama sekali memperoleh berbagai pengaruh kebudayaan bangsa lain melalui para pedagang asing.

Pengaruh yang pertama kali menyentuh masyarakat Indonesia menurut Nasikun (2012, hlm. 46) berupa pengaruh kebudayaan Hindu dan Budha dari India sejak 400 tahun sesudah Masehi. Setelah itu pengaruh kebudayaan Islam pada abad ke-13 dan pengaruh kebudayaan barat yang mulai memasuki masyarakat Indonesia melalui kedatangan bangsa Portugis pada permulaan abad ke-16. Kondisi ini telah membentuk keberagaman agama di dalam masyarakat Indonesia.

Kondisi tersebut sebenarnya merupakan sebuah kewajaran sejauh perbedaan-perbedaan dapat dimaklumi dan dihayati kehadirannya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia terbuka terhadap pengaruh-pengaruh yang ada dilingkungannya. Sebab menurut Koesman (2009, hlm. 222) perilaku dan gaya hidup seseorang dipengaruhi oleh zamannya. Artinya kemajemukan tidak lagi menjadi masalah utama selama negara bersama masyarakatnya mampu memfilter budaya baru tersebut dengan berpatokan pada nilai-nilai luhur yang dipegang. Prinsip inilah menjadi pedoman bangsa Indonesia dalam mengarungi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Lahirnya semboyan Bhinneka Tunggal Ika menjadi saksi nyata bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mengakui dan menjunjung tinggi nilai persatuan di atas perbedaan. Semboyan ini digunakan sebagai ilustrasi dari jati diri bangsa Indonesia secara sosiologis-kultural yang dibangun berdasarkan asas keberagaman. Kenyataan tersebut dijelaskan secara lengkap oleh Pursika (2009, hlm. 19) bahwa:

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan pernyataan jiwa yang mengakui realitas bangsa Indonesia yang majemuk (kebhinnekaan), namun selalu mencita-citakan terwujudnya kesatuan (ketunggal ikaan). Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika berarti Indonesia selain mengakui adanya kepelbagaian juga mengakui adanya kesatuan.

Kondisi inilah yang sebenarnya dapat dijadikan modal utama dalam menghadapi fenomena globalisasi. Pemahaman tentang kenyataan pentingnya integritas bangsa ditanamkan pada pola pikir seluruh komunitas bangsa Indonesia sebagai bentuk kesadaran akan bersatu dalam suatu bangsa dalam rangka mencapai cita-cita bangsa. Sebab pluralisme apabila didukung dan dikelola dengan baik akan menciptakan masyarakat yang bersatu secara tegap menuju kemajuan peradaban dunia. Karena eksistensi sebuah bangsa dapat diukur dari sejauh mana bangsa itu mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan peradaban dunia. Peradaban maju adalah produk dari bangsa yang maju, di dalamnya terdapat masyarakat yang memiliki pola pikir dan perilaku nilai luhur yang berimplikasi positif bagi kemajuan umat manusia (Pahlevi, 2017, hlm. 67).

Namun pada realitasnya, masalah yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini memperlihatkan lunturnya wawasan kebangsaan sebagai perekat persatuan bangsa. Terlihat masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial (SARA, tawuran, dll.), maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum tertangani secara tuntas, lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara (contoh: semangat gotong royong, kepatuhan hukum, kesantunan, kepedulian, dll.), pengaruh globalisme dengan paham bawaannya: liberalisme, individualisme, materialisme, hedonisme, dan Pancasila belum menjadi sikap dan perilaku sehari-hari (Aisyah, 2014; Sapriya, 2013).

Komnas HAM (komnasham.go.id) mencatat, telah terjadi peningkatan laporan kasus kebebasan beragama dan berkeyakinan. Pada 2015 laporan yang masuk kepada Komnas HAM tercatat meningkat, dari 74 pengaduan pada tahun 2014 menjadi 87 pengaduan, di mana dalam tiap pengaduan dapat mencakup lebih dari satu tindakan. Peningkatan laporan kasus kebebasan beragama dan berkeyakinan juga nampak dalam laporan Wahid Institute (voaindonesia.com) yang naik di tahun 2015 mencapai 190 peristiwa dengan 249 tindakan. Jumlah ini naik 23 persen dari tahun 2014 di mana jumlah peristiwa yang dilaporkan 158 peristiwa dengan 187 tindakan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan (wahidinstitute.org). Sedangkan tahun 2016 hingga awal 2017 ini, kondisi bangsa Indonesia tidak juga memberikan sinyal penurunan, konflik-konflik yang mengatasnamakan agama justru cenderung meningkat.

Kasus intoleran yang paling menyita perhatian baru-baru ini adalah penodaan agama yang dilakukan mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat kunjungannya ke pulau Seribu ketika masih berstatus sebagai gubernur (detik.com). Kasus ini menimbulkan konflik lebih luas yang melibatkan para pendukung Ahok dengan para penentang yang notabene adalah mayoritas umat Islam. Melihat kasus di atas, jelas terlihat bahwa perbedaan suku, ras dan agama masih menjadi senjata yang jitu untuk menciptakan konflik dalam berbagai kepentingan. Meskipun Sadjim, dkk (2016, hlm. 80) mengatakan bahwa konflik sebagai salah satu fenomena sosial yang hampir selalu melekat pada setiap kelompok masyarakat. Akan tetapi apabila terus dibiarkan berlarut tanpa ada penanganan dan antisipasi terhadap permasalahan tersebut, dapat dikhawatirkan menimbulkan ancaman serius terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Temuan terakhir dari “Survei Kehidupan Bernegara” yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2011 dilakukan di 181 kabupaten/kota, di 33 provinsi, di seluruh Indonesia yang melibatkan 12.056 responden ini tampak bahwa masyarakat Indonesia memiliki wawasan kebangsaan yang minim, bahkan ada sebanyak 10% masyarakat yang tidak mampu untuk menyebutkan sila-sila Pancasila secara lengkap. Ketika nilai-nilai luhur bangsa tidak termanifestasi dalam

perilaku sehari-hari maka semakin mudahnya budaya asing diterima menjadi pola kehidupan yang baru.

Fakta terbaru Tergambar dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Zulkifli (2016) memperlihatkan, bahwa 14 dari 16 orang mahasiswa menggunakan beasiswa untuk memenuhi gaya hidup hedonisnya. Tidaklah heran prof Masrukhi (Kompas.com) menyebutkan bahwa hanya 10% mahasiswa merupakan mahasiswa idealis sedangkan 90% merupakan mahasiswa hedonis. Hal ini, semakin memperjelas bahwa banyaknya generasi muda Indonesia sudah mulai meninggalkan nilai-nilai luhur bangsanya dan cenderung menerapkan budaya asing sebagai sistem nilainya.

Keadaan di atas menunjukkan bahwa, Bangsa ini belum sepenuh hati menerima dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, mematuhi UUD NRI 1945, berkomitmen pada NKRI, dan menyadari kehidupan dengan kondisi Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apabila kondisi ini terus dibiarkan, maka kita tinggal menunggu bom waktu untuk meruntuhkan rasa semangat nasionalisme yang selama ini menjadi pilar perekat bangsa. Puncaknya adalah nilai-nilai solidaritas sosial, kekeluargaan, keramahan sosial, dan rasa cinta tanah air yang dianggap sebagai ritme persatuan dan ciri khas bangsa Indonesia kini akan semakin hilang (Winarno, 2013; Barida, 2017; Sarjiman, 2001).

Untuk itu, suatu keniscayaan menanamkan dan membangunkan kesadaran berbangsa kepada seluruh komponen bangsa bahwa Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika harus diterima dan diamalkan sepenuh hati dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kesadaran ini, tentu setiap warga negara akan menerima fitrahnya sebagai bagian dari bangsa Indonesia dan ikut berkontribusi dalam pembangunan bangsa.

Karena itu, pentingnya penguatan kembali paradigma pemikiran kebangsaan dalam pendidikan sebagai upaya dalam menjaga kesadaran akan pentingnya nilai-nilai luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab menurut Sugilar (2017, hlm. 5) “pendidikan mampu menghasilkan insan-insan yang berwawasan kebangsaan dan memiliki daya untuk mewujudkan dan

memperkokohnya.” Di dalam Undang - Undang Sistem Pendidik Nasional Tahun 2003 Pasal 1 disebutkan:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Penjelasan di atas mengisyaratkan bahwa proses pendidikan dapat membentuk karakter, tentunya proses pendidikan yang baik akan melahirkan karakter yang baik pula. Lickona (2013, hlm. 82) mendefinisikan “karakter yang baik terdiri dari mengetahui hal yang baik, menginginkan hal yang baik, dan melakukan hal yang baik menjadi kebiasaan dalam cara berpikir, kebiasaan dalam hati, dan kehidupan dalam tindakan”. Ketiga hal ini diperlukan untuk mengarahkan dalam membentuk kedewasaan bertingkah laku agar tumbuh berkembang menjadi individu yang *good and smart* dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara.

Pada hakikatnya pendidikan memberikan ruang pada manusia untuk tumbuh berkembang menjadi pribadi yang tertata pola pikirnya, terbentuknya sikap dan perilaku baiknya. Perkara ini perlu dilakukan secara berkelanjutan demi menjamin keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab menurut Kaimuddin (2014, hlm. 48) “orientasi penyelenggaraan pendidikan sejatinya merupakan pintu utama dan pertama dalam membangun kepribadian atau karakter manusia.” Mengenai hal ini, Indonesia telah memberikan peranan besar terhadap pendidikan dalam membangun kualitas warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Salah satu elemen pendidikan yang diberikan *space* lebih dalam mengembangkan kepribadian warganegara dalam rangka menumbuhkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air adalah Pendidikan Kewarganegaraan atau *civic education*.

Hal ini tercantum dalam Pasal 37 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional secara khusus tidak menyebutkan, namun secara implisit, antara lain tercakup dalam muatan Pendidikan Kewarganegaraan, secara substansif dan pedagogis mempunyai misi

mengembangkan peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan rasa cinta tanah air. Jika dikaitkan dengan tantangan globalisasi, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki bagian penting dalam mempersiapkan warganegara *think global and act local*. Seperti yang dijelaskan oleh Wuryan dan Syaifullah (2008, hlm. 172) bahwa “Pendidikan Kewarganegaraan harus berorientasi kepada masalah-masalah yang terjadi tidak hanya lingkup nasional dan regional, melainkan dalam lingkup internasional atau global.”

Memahami tentang keindonesiaan, belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan, dan mencintai tanah air Indonesia adalah alasan mengapa perlu adanya PKn disekolah/ perguruan tinggi. Sebagai mata pelajaran/kuliah, PKn merupakan bagian dari proses penyiapan generasi muda dalam kapasitasnya menyadarkan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik dan terdidik (*smart and good citizen*) dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang demokratis dengan ikut serta dalam menjaga kelangsungan NKRI di masa yang akan datang.

Karena pada dasarnya untuk mempersiapkan warganegara yang siap berkompetensi di masa yang akan datang harus dibekali kemampuan-kemampuan yang diperlukannya. Sebab menurut Machali (2014, hlm. 85):

Kompetensi masa depan yang diperlukan dalam menghadapi arus globalisasi antara lain kemampuan berkomunikasi, berpikir jernih dan kritis, kemampuan mempertimbangkan segi moral suatu permasalahan, kemampuan menjadi warganegara yang bertanggungjawab, kemampuan mencoba untuk mengerti dan toleran terhadap pandangan yang berbeda, dan kemampuan hidup dalam masyarakat yang mengglobal

Berdasarkan perkembangan mutakhir, di mana tujuan PKn adalah partisipasi yang bermutu dan bertanggung jawab dari warga negara dalam kehidupan politik dan masyarakat baik pada tingkat lokal maupun nasional (Winataputra dan Budimansyah, 2012, hlm. 198). Untuk itu diperlukan penguasaan sejumlah kompetensi kewarganegaraan sebagai bekal menghadapi persaingan global. Hal ini dibutuhkan dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan terjadi di masa depan dengan tidak meninggalkan cara pandang terhadap bangsa sendiri dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan, cinta tanah air serta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Agustina, 2016, hlm. 1263).

Pendidikan Kewarganegaraan hadir membantu generasi muda untuk mematangkan kepribadiannya agar cakap dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan juga teknologi dengan memiliki rasa tanggung jawab tanpa menghilangkan nilai-nilai dasar agama, kebudayaan, rasa kebangsaan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 31 ayat 5 bahwa “pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.” Sebab rasa nasionalisme sangat penting eksistensinya bagi generasi muda Indonesia untuk bisa menjadi bangsa yang maju, bangsa yang modern, bangsa yang aman, damai, adil dan sejahtera (Amrah, 2016).

Hadirnya Pendidikan Kewarganegaraan di setiap jenjang penyelenggaraan pendidikan memiliki maksud untuk menyiapkan wawasan dan kesadaran kebangsaan yang tinggi, mampu bertindak cerdas, berwawasan global, berjiwa patriotik, berpikir komprehensif-integral dengan berlandaskan Falsafah Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional untuk mewujudkan cita-cita bangsa agar tetap terpelihara di kalangan warga negara muda. Karena menurut Sapriya dan Winataputra (2004, hlm. 121) faktor situasi sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan pendidikan seperti: situasi lingkungan tempat proses pembelajaran berlangsung, serta karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya peserta didik. Sebab rasa nasionalisme tidak bisa diwariskan melainkan terus dipupuk agar tetap terus tumbuh dalam sanubari setiap warga negara. Karena tujuan dari nasionalisme Indonesia adalah seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yang secara singkat dapat diartikan sebagai demi tercapainya kesejahteraan masyarakat Indonesia (Aulia, 2012, hlm. 10).

Jenjang pendidikan yang memfokuskan paham kebangsaan sebagai substansi materi PKn salah satunya ada di perguruan tinggi. Karena paling siap perihal usia, mental dan kemampuan mengaplikasikan adalah mahasiswa. Tidak salah sebutan *agent of change, agent of control and agent of social* disematkan pada mahasiswa. Dengan begitu, pembinaan terhadap mahasiswa menjadi warga negara yang berkompeten menjadi perhatian utama. Untuk mewujudkannya, seluruh

mahasiswa di perguruan tinggi diwajibkan mengontrak mata kuliah PKn yang nantinya diharapkan dapat menjadi *spirit* dalam membentuk jadi diri pada mahasiswa guna mengembangkan jiwa profesionalitasnya sesuai dengan bidang studinya masing-masing.

Usaha Perguruan Tinggi telah di atur dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Pasal 35 Ayat 1 yakni bahwa “Kurikulum Perguruan Tinggi Wajib Memuat Mata Kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia. Yang dimaksud dengan “mata kuliah kewarganegaraan” adalah pendidikan yang mencakup Pancasila, Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika untuk membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Dengan demikian, dapat diperoleh gambaran bahwa PKn sebagai sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia Indonesia yang bermutu dengan memiliki wawasan dan kesadaran kebangsaan yang tinggi, mampu bertindak cerdas, berjiwa patriotik dan ikut serta dalam mewujudkan tujuan nasional .

Untuk itu, pentingnya penguatan wawasan kebangsaan mahasiswa sebagai prospek mengingatkan kembali terhadap jati dirinya sebagai anak bangsa yang memiliki kewajiban dalam mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan rela berkorban sebagai bakti terhadap negara dan bangsa. Sebab penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Zulfikar (2015, hlm. 4) menemukan bahwa sikap pasif sebagian besar mahasiswa terhadap isu-isu sosial dilingkungannya, membuktikan disfunksinya mahasiswa sebagai kaum intelektual yang peka terhadap fenomena sosial yang terjadi. Hal inilah yang mendorong peneliti ingin lebih jauh mendalami tentang prospek penguatan wawasan kebangsaan mahasiswa melalui mata kuliah PKn dalam usahanya mengembalikan fitrah mahasiswa sebagai anak bangsa yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap negara dan bangsa.

Oleh sebab itu, kajian dalam penelitian ini difokuskan terhadap *sense of belonging, sense of responsibility, sense of commitment* mahasiswa sebagai potret

saat ini, dan urgensinya penguatan wawasan kebangsaan dalam pembelajaran PKn di perguruan tinggi sebagai ekspektasi mengembalikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman hidup mahasiswa selaku kaum intelektual yang reaktif terhadap kondisi sosial di tengah-tengah gelombang arus globalisasi. Karena menurut Karliani, & Ibrahim (2014, hlm. 2) pembelajaran PKn merupakan inovasi yang memberikan penguatan nilai ideologi bangsa yang akan menyatukan bangsa Indonesia di tengah fenomena disintegrasi bangsa.

Berdasarkan latar belakang di atas, dengan adanya PKn sebagai salah satu program mata kuliah umum di perguruan tinggi, diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kembali wawasan kebangsaan di kalangan mahasiswa sebagai bentuk penguatan nilai-nilai adiluhung sebagai falsafah hidup generasi muda. Sehingga dengan adanya wawasan kebangsaan yang diorganisasikan dalam materi Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan menjadi sebuah filter terhadap gaya hidup bebas yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang selama ini menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia. Keadaan inilah yang mendorong penulis untuk terus mendalami lebih dalam :**“Kajian Tentang Penguatan Wawasan Kebangsaan Mahasiswa Melalui Pendidikan Kewarganegaraan (Suatu Analisis Deskriptif Terhadap Potret dan Prospek PKn di Perguruan Tinggi).”**

B. Fokus Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, dapat diidentifikasi adanya gejala terhadap menurunnya identitas bangsa di kalangan masyarakat Indonesia. Sehingga muncul indikasi terhadap rasa kebangsaan, paham kebangsaan, spirit kebangsaan sudah tidak menjadi landasan dalam praktik kehidupan bernegara. Untuk itu, dibutuhkan penguatan pada wawasan kebangsaan masyarakat Indonesia khususnya pada mahasiswa yang memiliki peran sebagai *moral force*. Sebab dalam wawasan kebangsaan terdapat beberapa unsur seperti Pancasila sebagai Ideologi dan pandangan hidup bangsa, UUD NRI 1945 sebagai *states fundamental norm*, wawasan nusantara sebagai cara pandang mengenal diri dan lingkungannya sebagai bentuk penanaman rasa persatuan dalam wadah NKRI,

dan bhinneka tunggal ika sebagai penerimaan diri terhadap fitrahnya sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang terdiri atas keberagaman. Untuk penguatan unsur-unsur wawasan kebangsaan di atas, maka penelitian ini memfokuskan pada peranan PKn sebagai salah satu mata kuliah yang diamanatkan oleh undang-undang untuk menguatkan wawasan kebangsaan pada mahasiswa.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus masalah dalam penelitian ini yakni bagaimana penguatan wawasan kebangsaan melalui Pendidikan Kewarganegaraan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus masalah di atas, selanjutnya dirinci pertanyaan penelitiannya sebagai berikut :

1. Bagaimana potret wawasan kebangsaan mahasiswa ditinjau dari perspektif mahasiswa dan dosen?
2. Bagaimana relevansi Pendidikan Kewarganegaraan dengan kebutuhan penguatan wawasan kebangsaan mahasiswa?
3. Bagaimana prospek penguatan wawasan kebangsaan mahasiswa melalui Pendidikan Kewarganegaraan?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berkaitan erat dengan permasalahan penelitian. Tujuan penelitian berisi tentang rumusan hasil yang akan dicapai dalam penelitian yang merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian yang dilakukan. Adapun tujuan umum yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai potret dan prospek penguatan wawasan kebangsaan mahasiswa melalui Pendidikan Kewarganegaraan

Sedangkan tujuan khusus penelitian dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan potret dan prospek wawasan kebangsaan mahasiswa dilihat dari pandangan mahasiswa dan dosen.
2. Untuk mengetahui relevansi Pendidikan Kewarganegaraan dalam memenuhi penguatan wawasan kebangsaan mahasiswa
3. Untuk mendeskripsikan prospek penguatan wawasan kebangsaan mahasiswa melalui Pendidikan Kewarganegaraan

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini penulis harapkan dapat memberikan sumbangan baik secara teoritis maupun secara praktis terhadap pengetahuan dan pengalaman hidup serta dalam khazanah ilmu pengetahuan yang menunjang proses pendidikan nasional.

1. Dari Segi Teori

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam aspek teori (keilmuan), yaitu bagi pengembangan pemahaman ilmu, khususnya dalam penguatan wawasan kebangsaan mahasiswa melalui Pendidikan Kewarganegaraan.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu menggali pendekatan baru dalam penerapan pendidikan keilmuan dalam Pendidikan Kewarganegaraan sebagai proses pendidikan yang berfungsi membentuk generasi penerus yang memiliki wawasan kebangsaan yang kuat.
- c. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan inovasi baru dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi dalam upayanya sebagai penguatan wawasan kebangsaan para mahasiswa.
- d. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman untuk peneliti selanjutnya dalam menggali rasa nasionalisme para generasi muda.

2. Dari Segi Kebijakan

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman untuk perguruan tinggi dalam membuat inovasi pembuatan kurikulum sebagai upaya membangun karakter mahasiswa yang berguna di kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pemerintah dalam membuat kebijakan mengenai pembangunan sumber daya manusia Indonesia untuk masa depan yang memiliki rasa kebangsaan, paham kebangsaan, dan semangat kebangsaan sebagai bentuk partisipasi aktif dalam memenuhi kepentingan nasional.

3. Dari Segi Praktik

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengambil keputusan di bidang pendidikan khususnya di perguruan tinggi bahwa pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dapat memberikan nilai positif terhadap kesadaran mahasiswa terhadap pentingnya memiliki wawasan kebangsaan dalam menjaga kebhinnekaan Indonesia.
- b. Penelitian ini diharapkan menunjukkan kepada pemberi keputusan serta insan pendidikan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan benar-banar unsur penting di perguruan tinggi dalam proses pendidikan baik keilmuan maupun pengembangan karakter bangsa bagi para mahasiswa.
- c. Penelitian ini diharapkan menjadi suatu informasi dalam memberikan rangsangan kepada semua mahasiswa, orang tua dan masyarakat bahwa Pendidikan Kewarganegaraan secara umum sangat penting dalam proses pendewasaan seseorang.
- d. Penelitian ini diharapkan dapat memperjelas posisi PKn dalam penguatan pengetahuan dan kepribadian mahasiswa yang dilaksanakan dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
- e. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para dosen dan mahasiswa dalam mewujudkan *smart and good citizen* dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

4. Dari segi isu serta aksi sosial

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan gambaran mengenai peranan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata kuliah wajib umum (MKWU) dalam meningkatkan dan menguatkan rasa kebangsaan, paham kebangsaan, semangat kebangsaan yang termuat dalam wawasan kebangsaan khususnya bagi mahasiswa di Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon.

E. Struktur Penulisan Tesis

Bab 1, yaitu pendahuluan. Merupakan bagian awal dari penelitian, dalam bab ini terbagi-bagi dalam beberapa sub bab seperti: latar belakang masalah, yang berisikan mengenai mengapa masalah yang diteliti itu timbul dan apa yang menjadi alasan peneliti mengangkat masalah tersebut. Selain latar belakang masalah, dalam penelitian ini terdapat pula identifikasi masalah penelitian guna mengidentifikasi masalah yang ada di lapangan, rumusan masalah dan pertanyaan penelitian dibuat agar penelitian ini menjadi lebih terfokus. Tujuan penelitian, penelitian bertujuan untuk menyajikan hal yang ingin dicapai setelah melaksanakan penelitian. Terdapat pula manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II, merupakan kajian pustaka. Bab ini sangat penting karena melalui kajian pustaka di tunjukan dari teori yang sedang dikaji dan kedudukan masalah peneliti dalam bidang ilmu yang diteliti. Sub kedua menjelaskan mengenai, Pendidikan Kewarganegaraan, Wawasan Kebangsaan, dan penelitian terdahulu.

Bab III, yaitu metodologi penelitian. Bab ini merupakan penjabaran lebih rinci mengenai metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitiannya. Lebih jelasnya yaitu langkah-langkah apa saja yang akan ditempuh dalam penelitian, lokasi dan subjek penelitian, definisi operasional, teknik pengembangan instrumen, teknik pengolahan dan analisis data, pengujian keabsahan data, dan prosedur penelitian.

Bab IV, merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini berisikan hasil penelitian, dalam hal ini peneliti akan menguraikan hasil-hasil data yang telah diolah peneliti serta adanya analisis dari hasil pengolahan tersebut. Dalam bab ini pula digambarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

Bab V, simpulan dan saran. Bab ini adalah bab yang terakhir. Dalam bab ini disajikan penafsiran atau pemaknaan penelitian berupa simpulan terhadap hail penelitian yang telah dilakukan. Selain simpulan ada pula saran yang bertolak dari titik lemah atau kekurangan yang didapat selama penelitian.